

Hubungan Penerapan SAP dengan Kualitas Informasi Keuangan Daerah: Analisis Sekunder pada LKPD Kota Pariaman

Putri Ramadhani¹, Novita Sari², Meri Wahyuni³, Azizah Syafriani⁴

^{1, 2, 3, 4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat

E-mail Korespondensi : putrimdhni109@gmail.com, novitasari11062024@gmail.com, wahyunimery170@gmail.com,
azizahsyf13@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 28/10/2025

Revised 28/10/2025

Accepted 28/10/2025

Abstract

This study discusses the relationship between the implementation of Government Accounting Standards (SAP) based on the accrual system and the quality of regional financial information in the Pariaman City Government. The main issue addressed is how the consistency of SAP implementation affects the transparency, accountability, and reliability of public financial reports. The purpose of this study is to assess the extent to which the application of SAP contributes to improving the quality of financial statements, particularly in terms of relevance, understandability, and comparability of information presented in the Local Government Financial Statements (LKPD). This research employs a qualitative descriptive approach using document analysis as a form of secondary data derived from the audited 2022 LKPD of Pariaman City. The analysis was conducted by reviewing the compliance of financial statement presentation with SAP regulations and evaluating inter-period consistency and auditor notes. The findings indicate that the accrual-based SAP implementation in Pariaman City has been carried out effectively and in accordance with applicable regulations, although some challenges remain in the areas of staff competence and the effectiveness of accounting information systems. Overall, the study concludes that the implementation of SAP has a positive influence on improving the quality of regional financial information and strengthens government financial transparency in supporting public accountability, financial oversight, and more efficient, targeted, and sustainable decision-making aligned with the principles of good governance.

Keywords: Government Accounting Standards, LKPD, financial information quality, Pariaman City

Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan kualitas informasi keuangan daerah di Pemerintah Kota Pariaman. Isu utama yang diangkat adalah bagaimana konsistensi penerapan SAP memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana penerapan SAP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya dalam hal relevansi, keterpahaman, dan daya banding informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen sebagai bentuk data sekunder yang bersumber dari LKPD Kota Pariaman tahun 2022 yang telah diaudit. Analisis dilakukan dengan meninjau kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap ketentuan SAP, serta menilai konsistensi antarperiode dan catatan auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di Kota Pariaman telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat kendala dalam aspek kompetensi aparatur dan efektivitas sistem informasi akuntansi. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SAP memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas informasi keuangan daerah dan memperkuat transparansi keuangan pemerintah dalam mendukung akuntabilitas publik, pengawasan keuangan, serta pengambilan keputusan yang lebih efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, LKPD, kualitas informasi keuangan, Kota Pariaman



PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, dapat dipercaya, dan relevan. Dalam konteks ini, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi langkah strategis yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pelaporan keuangan sektor publik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

SAP berbasis akrual mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi yang memungkinkan pengakuan pendapatan dan belanja pada saat terjadinya, bukan sekadar saat kas diterima atau dibayarkan. Dengan pendekatan ini, laporan keuangan pemerintah tidak hanya menggambarkan arus kas, tetapi juga mencerminkan posisi keuangan secara menyeluruh, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Di tingkat pemerintah daerah, penerapan SAP berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan, yang pada akhirnya memperkuat fungsi pengendalian, pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Fitri (2017) menyoroti pentingnya kompetensi sumber daya manusia dan peran sistem informasi sebagai determinan utama keberhasilan penerapan SAP. Penelitian JAEBE (2020) juga menunjukkan bahwa pemahaman aparaturnya terhadap SAP serta kesesuaian pelaksanaan dengan regulasi turut menentukan tingkat kualitas informasi yang disajikan. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut menggunakan pendekatan survei langsung kepada pegawai SKPD, dan belum banyak yang melakukan analisis mendalam terhadap isi laporan keuangan itu sendiri sebagai data sekunder yang mencerminkan output dari penerapan SAP.

Di sinilah letak kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Sampai saat ini, kajian yang secara spesifik menganalisis hubungan antara penerapan SAP dan kualitas informasi keuangan daerah melalui pendekatan analisis sekunder pada dokumen LKPD masih sangat terbatas, khususnya di Kota Pariaman. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada persepsi pengguna atau aparat pengelola keuangan, sementara aspek dokumentatif dari laporan keuangan yang telah diaudit jarang dikaji secara sistematis. Padahal, LKPD merupakan produk konkret dari proses akuntansi pemerintah yang dapat dianalisis secara objektif untuk menilai sejauh mana penerapan SAP benar-benar mencerminkan kualitas informasi keuangan yang andal.

Selain itu, kualitas informasi keuangan pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari sisi ketepatan waktu dan kelengkapan, tetapi juga dari aspek relevansi, keandalan, daya banding, dan keterpahaman. Jika SAP diterapkan secara konsisten, maka seharusnya laporan keuangan yang dihasilkan mampu memenuhi semua karakteristik tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menguji sejauh mana hubungan antara tingkat kepatuhan terhadap SAP dengan indikator kualitas informasi keuangan yang tertuang dalam LKPD Kota Pariaman.

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu akuntansi sektor publik. Dalam konteks akademik, studi ini akan memperkaya literatur mengenai implementasi SAP berbasis akrual di tingkat daerah serta pengaruhnya terhadap kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Di sisi lain, dari perspektif praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi Pemerintah Kota Pariaman dan pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas publik.

Dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia secara publik dan telah diaudit, penelitian ini menghindari bias persepsi dan lebih fokus pada hasil nyata dari proses akuntansi yang dijalankan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap lebih objektif dan relevan dalam menilai kualitas implementasi SAP secara nyata di lapangan. Selain itu, penggunaan metode analisis sekunder juga memperkuat validitas temuan karena bersumber dari dokumen resmi yang telah melalui proses verifikasi oleh auditor negara.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan kualitas informasi keuangan daerah, khususnya yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman. Meskipun SAP telah ditetapkan sebagai standar penyusunan laporan keuangan di sektor publik, masih terdapat pertanyaan apakah penerapannya telah berjalan secara optimal dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, seperti relevansi, keandalan, keterpahaman, dan daya

banding. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus ingin mengkaji sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap SAP berbasis akrual berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Pariaman melalui pendekatan analisis data sekunder terhadap LKPD yang telah diaudit. Pertanyaan penting yang ingin dijawab adalah apakah implementasi SAP telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan bagaimana indikator-indikator penerapan SAP berkontribusi terhadap penyajian informasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara penerapan SAP berbasis akrual dengan kualitas informasi keuangan daerah, dengan studi kasus pada LKPD Kota Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi SAP berkontribusi terhadap pemenuhan karakteristik laporan keuangan yang baik, seperti relevansi, keandalan, keterpahaman, dan daya banding. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan bukti empiris melalui pendekatan data sekunder mengenai efektivitas penerapan SAP dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam memperbaiki sistem penyusunan laporan keuangan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan kualitas informasi keuangan daerah, khususnya melalui analisis sekunder terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman. SAP merupakan pedoman utama yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sektor publik, yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintah. Dalam konteks ini, LKPD menjadi salah satu output penting dari proses penerapan SAP, karena dokumen tersebut mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, serta tanggung jawab fiskal pemerintah daerah kepada publik dan pemangku kepentingan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis dokumen LKPD sebagai bentuk data sekunder yang digunakan untuk menilai sejauh mana SAP telah diimplementasikan secara konsisten, dan bagaimana penerapannya berkorelasi dengan karakteristik informasi keuangan yang berkualitas.

Secara konseptual, yang mendasari penelitian ini adalah *Information Quality Theory*, yang dikembangkan dalam studi-studi akuntansi dan sistem informasi. Teori ini menyatakan bahwa kualitas suatu informasi sangat dipengaruhi oleh sistem dan prosedur yang digunakan dalam proses pencatatan dan pelaporannya (Abdul Halim & Kusufi, 2014). Dalam konteks akuntansi pemerintahan, SAP merupakan sistem dan prosedur standar yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Dengan demikian, semakin baik tingkat implementasi SAP, maka semakin tinggi pula kualitas informasi yang dihasilkan. Teori ini mendukung pandangan bahwa informasi keuangan yang berkualitas bukan hanya bergantung pada data yang disajikan, tetapi juga pada bagaimana data tersebut diproses dan dilaporkan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Indikator dari penerapan SAP dalam penelitian ini merujuk pada komponen-komponen pokok yang diatur dalam SAP berbasis akrual, seperti pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, serta penyusunan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Mardiasmo (2018) menyebut bahwa penerapan SAP harus diwujudkan melalui proses pencatatan yang sesuai prinsip akrual, di mana transaksi dicatat pada saat terjadinya, tidak tergantung pada arus kas. Dalam konteks LKPD Kota Pariaman, indikator penerapan SAP dapat dilihat dari sejauh mana laporan keuangan menyajikan transaksi keuangan berdasarkan prinsip akrual tersebut, serta apakah semua jenis laporan telah disusun secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan dalam SAP.

Teori *Public Sector Financial Accounting Theory* ini menjelaskan bahwa akuntansi di sektor publik berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban publik (accountability) dan pengambilan keputusan. Dalam konteks SAP berbasis akrual, teori ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi berdasarkan saat terjadinya (accrual basis), bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah seperti LKPD dapat menyajikan informasi yang lebih relevan, andal, dan komprehensif tentang posisi keuangan dan kinerja fiskal pemerintah. Teori ini mendasari pengembangan SAP dan menjadi acuan normatif dalam menilai kualitas informasi keuangan sektor publik.

Accounting Information Quality Theory menjelaskan karakteristik utama informasi akuntansi yang berkualitas, seperti: relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Informasi yang relevan membantu pengguna laporan dalam mengambil keputusan yang tepat, sementara keandalan

mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap data yang disajikan. Keterbandingan memungkinkan evaluasi kinerja dari waktu ke waktu atau antar entitas, sedangkan keterpahaman memastikan bahwa informasi dapat dimengerti oleh para pengguna, termasuk masyarakat umum. Dalam konteks sektor publik, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual diharapkan dapat memperkuat keempat karakteristik tersebut dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan SAP, transaksi dicatat secara sistematis dan sesuai prinsip akuntansi, sehingga laporan yang dihasilkan lebih informatif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Yuni dan Kusumaningarti (2024) yang menyatakan bahwa standar akuntansi yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas informasi keuangan di sektor pemerintahan.

Teori *Intitutional Theory* ini menekankan bahwa organisasi publik, seperti pemerintah daerah, cenderung menyesuaikan diri dengan norma, regulasi, dan praktik yang dilembagakan secara luas agar dianggap sah secara sosial (legitimate). Dalam konteks ini, penerapan SAP merupakan respons terhadap regulasi pemerintah pusat yang dilembagakan melalui PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual (Jurnal Dharmawangsa 2021).

Penelitian ini didasarkan pada lima grand teori utama yang saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara penerapan SAP dan kualitas informasi keuangan daerah. *Information Quality Theory* menegaskan bahwa sistem dan prosedur akuntansi, seperti SAP, sangat menentukan kualitas informasi yang dihasilkan. *Public Sector Financial Accounting Theory* memperluas fungsi akuntansi di sektor publik sebagai alat akuntabilitas dan pengambilan keputusan melalui pencatatan berbasis akrual. *Accounting Information Quality Theory* menekankan bahwa SAP yang diterapkan dengan baik akan meningkatkan karakteristik penting dari informasi keuangan, seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. *Institutional Theory* menjelaskan bahwa adopsi SAP oleh pemerintah daerah merupakan bentuk respons terhadap tekanan institusional dan regulatif guna memperoleh legitimasi publik. Secara keseluruhan, kelima teori ini mendukung argumen bahwa implementasi SAP yang konsisten dan sesuai standar berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun untuk menjawab pertanyaan tentang sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berkaitan dengan kualitas informasi keuangan daerah, dengan menggunakan dokumen keuangan sebagai sumber utama data. Bagian metodologi berikut menjelaskan jenis penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data, dan cara penyajian hasil analisis secara sistematis, ringkas, dan mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis analisis dokumen (studi dokumen), tanpa melibatkan penghitungan statistik atau instrumen kuantitatif seperti kuesioner atau wawancara numerik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap isi laporan keuangan (LKPD) yang telah diaudit sebagai representasi nyata dari penerapan SAP dan kualitas informasi yang dihasilkan. Penelitian deskriptif berarti peneliti menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi penerapan SAP dan karakteristik informasi keuangan. Dengan metode dokumen, penelitian ini berupaya “membaca” dan “menafsirkan” laporan keuangan sebagai dokumen publik untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan antara penerapan SAP dan kualitas informasi keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan intervensi terhadap objek atau manipulasi variabel, melainkan mengambil dokumen yang sudah ada, lalu melakukan analisis konten atas dokumen tersebut. Dengan demikian, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian non-eksperimental yang bersifat observasional. Fokusnya bukan pada pengujian hipotesis dengan statistik rumit, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap dokumen resmi sebagai cermin praktik akuntansi pemerintahan di daerah.

Objek penelitian adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman yang telah diaudit oleh lembaga pengawas (seperti BPK) dalam periode tertentu. Dokumen yang menjadi objek meliputi neraca, laporan operasi, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). LKPD dipilih sebagai objek karena dokumen ini mencerminkan langsung bagaimana SAP diterapkan dan bagaimana kualitas informasi keuangan dikomunikasikan kepada publik. Sebagai dokumen resmi, LKPD menyajikan catatan keuangan yang telah melalui proses audit, sehingga menjadi sumber data yang terpercaya dan relevan untuk penelitian.

Peneliti mengkaji LKPD dari beberapa periode (lima tahun terakhir) sehingga perbandingan antar dokumen dapat dilakukan. Dengan demikian, objek penelitian ini bukan orang atau pegawai, melainkan dokumen otoritatif yang memuat hasil akhir dari aktivitas keuangan pemerintah daerah. Analisis mendalam terhadap objek dokumen ini memungkinkan peneliti menangkap pola-pola penerapan SAP dan karakteristik kualitas yang konsisten atau berubah dari tahun ke tahun.

Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa dokumen laporan keuangan daerah yang telah diaudit serta dokumen pendukung terkait. Sumber data utama berasal dari situs resmi Pemerintah Kota Pariaman, portal transparansi keuangan daerah, publikasi LKPD tahunan, serta dokumen audit dari lembaga pengawas. Temuan auditor, catatan pemeriksaan, rekomendasi, dan opini audit menjadi data tambahan penunjang.

Karena penelitian ini tidak menggunakan data primer (seperti wawancara atau kuesioner), seluruh data diperoleh dari arsip publik dan dokumen legal yang sah. Peneliti memastikan bahwa dokumen yang digunakan adalah versi final yang telah diaudit dan disetujui, bukan draf sementara atau laporan internal yang belum diverifikasi. Data sekunder tersebut mencakup aspek-aspek penerapan SAP serta aspek kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini berlangsung selama beberapa bulan, meliputi tahap persiapan dokumen, analisis konten, interpretasi hasil, dan penyusunan laporan. Pengumpulan data dokumen akan dilakukan selama periode penelitian (dari bulan Januari hingga Maret), sedangkan analisis dokumen berlangsung selama bulan April hingga Mei, dan interpretasi hingga Juni. Jika dokumen LKPD tersedia hingga tahun tertentu (hingga 2022 atau 2023), maka periode yang digunakan bisa 4–5 tahun ke belakang untuk mendapatkan gambaran perubahan dan tren.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menangkap satu dokumen saja, melainkan merangkum data dari beberapa tahun agar hubungan antara penerapan SAP dan kualitas informasi dapat dianalisis dalam jangka waktu tertentu, bukan snapshot tunggal.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (document review). Peneliti secara sistematis mengumpulkan seluruh dokumen LKPD yang tersedia dari Pemerintah Kota Pariaman melalui situs resmi, arsip publik, atau permintaan resmi jika diperlukan. Dokumen tersebut kemudian diorganisasikan berdasarkan tahun, jenis laporan (neraca, laporan operasi, laporan arus kas, LRA, CALK), dan dokumen pendukung audit (catatan pemeriksaan dan opini auditor). Peneliti memastikan bahwa dokumen yang diunduh adalah versi yang telah diaudit atau telah disahkan publik, bukan salinan draf internal.

Peneliti memeriksa setiap dokumen secara menyeluruh untuk mengecek struktur laporan, akun-akun yang digunakan, kecocokan antara laporan utama dan catatan atas laporan keuangan, serta konsistensi pengungkapan dari tahun ke tahun. Untuk melengkapi, peneliti mencocokkan data LKPD dengan catatan pemeriksaan auditor, rekomendasi, dan opini audit untuk memahami kelemahan yang dicatat auditor—sebagai tambahan interpretasi terhadap kualitas informasi. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari dokumen tahun paling lama hingga tahun paling baru, agar dapat memetakan alur perubahan dalam praktik penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data bersifat analisis konten dokumen dan komparatif. Peneliti membaca dan menelaah isi laporan keuangan yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan kategorisasi elemen-elemen penerapan SAP dan karakteristik kualitas informasi keuangan. Peneliti memeriksa apakah laporan memuat semua elemen yang diwajibkan SAP (aset, kewajiban, pendapatan, beban) dan sejauh mana laporan menyertakan catatan atas laporan keuangan yang memadai. Untuk karakteristik kualitas, peneliti menilai dari aspek relevansi pengungkapan (apakah informasi material disajikan), keandalan (kemungkinan adanya pengungkapan penuh dan verifikasi auditor), daya banding (konsistensi laporan antar tahun), dan keterpahaman (apakah catatan dan penyajian laporan jelas dan mudah dipahami).

Setelah konten laporan dianalisis, peneliti melakukan komparasi antar periode untuk melihat perubahan pola penerapan SAP dan kualitas informasi keuangan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, analisis tidak sekadar snapshot tunggal, tetapi juga melihat tren dan kemajuan penerapan SAP dalam konteks kualitas laporan keuangan daerah. Peneliti menyusun narasi interpretatif berdasarkan temuan konten dan perbandingan lintas tahun, dengan mengaitkan hasilnya ke teori-teori akuntansi sektor publik dan temuan penelitian terdahulu (Fitri, 2017; Putra et al., 2022; Udiyanti, 2021). Interpretasi dibangun secara objektif, mengaitkan fakta dokumen dengan regulasi SAP, catatan auditor, dan literatur relevan.

Agar data dan interpretasi penelitian ini menjadi valid dan dapat dipercaya, peneliti menerapkan beberapa langkah berikut: Verifikasi dokumen: memastikan bahwa setiap dokumen LKPD yang

digunakan adalah versi audit final atau versi resmi publik, bukan dokumen draf atau salinan tak sah. Dokumen dikonfirmasi melalui portal resmi pemerintah daerah atau situs lembaga pengawas. Triangulasi sumber dokumen: mencocokkan isi laporan LKPD dengan catatan pemeriksaan auditor, rekomendasi auditor, dan opini audit, guna memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan evaluasi independen pihak eksternal. Konsistensi antar tahun: memeriksa apakah struktur laporan dan skema pengungkapan konsisten dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jika ada perubahan struktur signifikan, peneliti mencatat perubahan tersebut sebagai variabel interpretatif. Peer debriefing / pengecekan silang: jika memungkinkan, peneliti meminta kolega atau sahabat akademik untuk membaca dan mengevaluasi hasil interpretasi dokumen, memastikan agar bias personal minimal. Catatan jejak audit (audit trail): peneliti menyimpan catatan langkah-langkah analisis, kode klasifikasi, dan alasan pengambilan keputusan interpretatif agar proses bisa ditelusuri kembali oleh peneliti lain.

Transparansi interpretasi: dalam laporan hasil, peneliti secara jujur menyebutkan dokumen yang tidak lengkap atau ambigu, serta keterbatasan akses dokumen, sehingga pembaca memahami konteks dan keterbatasan penelitian.

Narasi interpretatif akan menjelaskan pola, kemajuan, atau kelemahan penerapan SAP berdasarkan data dokumen, serta implikasi terhadap kualitas informasi keuangan daerah. Peneliti akan mengaitkan temuan dengan literatur sebelumnya—temuan dari Fitri (2017) terkait kompetensi SDM dan sistem informasi, atau Putra et al. (2022) mengenai peran sistem informasi pemerintah daerah—agar hasil penelitian lebih kaya dalam perspektif teoretis dan praktis. Jika ditemukan anomali atau ketidaksesuaian, peneliti akan menyoroti faktor-faktor penyebab potensial berdasarkan dokumen auditor atau catatan pemeriksaan.

Akhirnya, kesimpulan dan rekomendasi penelitian akan disajikan berdasarkan temuan dokumen, dengan menyebutkan batasan penelitian (keterbatasan akses dokumen, perubahan kebijakan akuntansi antar tahun) dan saran untuk penelitian lanjutan dan perbaikan praktik pelaporan keuangan daerah.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan kualitas informasi keuangan daerah, khususnya melalui analisis sekunder terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan daerah yang telah diaudit dan publikasi hasil penelitian terkait penerapan SAP di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Melalui data tersebut, peneliti dapat menyajikan gambaran objektif mengenai bagaimana penerapan SAP memengaruhi kualitas laporan keuangan, yang merupakan cerminan transparansi, akurasi, dan relevansi informasi keuangan pemerintah daerah.

Pertama, dari hasil analisis dokumen LKPD Kota Pariaman Tahun 2022, ditemukan bahwa penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan semakin konsisten dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Pariaman secara bertahap mengadopsi standar berbasis akrual yang merupakan bagian dari SAP terbaru, sebagaimana diuraikan dalam laporan resmi Pemerintah Kota Pariaman (2023). Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan daerah tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berupaya menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung temuan ini, Fitri (2017) yang menyoroti pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. Dalam konteks Kota Pariaman, kualitas SDM yang mengelola akuntansi pemerintah menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini diperkuat oleh temuan JAEBE (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman dan penerapan SAP secara tepat berkontribusi signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan perangkat daerah. Selanjutnya, kualitas informasi keuangan daerah dilihat dari berbagai aspek seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan Kota Pariaman (2023), terjadi peningkatan signifikan pada aspek keterbandingan dan keterpahaman laporan keuangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan indikator bahwa penerapan SAP sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan laporan yang mudah dipahami oleh pengguna laporan, termasuk masyarakat, DPRD, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Namun, meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, beberapa penelitian juga menemukan adanya hambatan dalam penerapan SAP di lingkungan pemerintahan daerah. Jurnal Dharmawangsa (2021) mencatat bahwa resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan dalam pelatihan serta dukungan

teknis masih menjadi tantangan yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini juga terlihat dalam beberapa temuan dari studi lain seperti Ningsih (2014) yang menekankan pentingnya dukungan atasan dan pelatihan berkelanjutan bagi staf akuntansi untuk memastikan kualitas data dan laporan yang optimal.

Melalui analisis data sekunder, penelitian ini juga mengamati bahwa sistem pengendalian internal yang efektif menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga kualitas informasi keuangan daerah. Udiyanti (2021) menegaskan bahwa pengendalian internal yang kuat membantu meminimalkan risiko kesalahan dan manipulasi data dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam konteks Kota Pariaman, sistem pengendalian internal yang diterapkan mulai menunjukkan hasil yang positif, yang tercermin dari laporan audit yang relatif bebas dari temuan signifikan yang berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Selain itu, teknologi informasi dan sistem informasi pemerintahan daerah berperan sebagai pendukung penerapan SAP. Putra, Yulastri, dan Giatman (2022) mengemukakan bahwa integrasi sistem informasi yang baik dapat mempercepat proses pencatatan dan pelaporan keuangan, serta meningkatkan akurasi data. Kota Pariaman telah mulai mengadopsi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pelatihan dan pengembangan sistem tersebut agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelaporan keuangan yang dinamis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, temuan utama dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan SAP dengan kualitas informasi keuangan daerah di Kota Pariaman. Penerapan SAP yang sesuai standar tidak hanya memperbaiki kualitas laporan keuangan secara teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui transparansi yang lebih baik. Hal ini sangat penting mengingat peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa kendala seperti kurangnya kompetensi SDM, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan sistem informasi masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar penerapan SAP dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan, peningkatan dukungan manajemen, serta pengembangan sistem informasi yang lebih handal menjadi rekomendasi utama untuk memperbaiki kualitas informasi keuangan daerah secara menyeluruh.

Pembahasan ini berfokus pada hubungan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan kualitas informasi keuangan daerah, khususnya di daerah Kota Pariaman, berdasarkan analisis data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan studi terdahulu yang relevan. Pembahasan ini meliputi evaluasi penerapan SAP, faktor pendukung dan penghambat, dampak terhadap kualitas informasi keuangan, serta implikasi praktis dan teoritis dari temuan yang ada.

Penerapan SAP juga sudah berjalan secara signifikan dan sesuai pada standar berbasis akrual sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah. Hal ini didukung dengan temuan Pemerintah Kota Pariaman tahun 2023 yang menyebutkan bahwa proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi yang benar dan terstandarisasi.

1. Penerapan SAP yang konsisten

Fitri (2017) menegaskan bahwa pilar utama dalam keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi, yang memperkuat temuan bahwa sumber daya manusia akuntansi yang terlatih dan sistem informasi yang baik mempermudah implementasi SAP di lingkungan pemerintahan.

Tabel 1. ringkasan temuan dari berbagai aspek penerapan SAP dan kualitas informasi keuangan di Kota Pariaman berdasarkan data sekunder dan literatur terkait.

Aspek	Temuan Utama
Penerapan SAP	Konsistensi dengan standar berbasis akrual, peningkatan kualitas laporan
Kompetensi SDM	Faktor utama keberhasilan penerapan SAP
Kualitas Informasi	Peningkatan keterbandingan dan keterpahaman laporan
Hambatan Penerapan	Resistensi perubahan, pelatihan kurang, dukungan atasan terbatas

Sistem Pengendalian	Pengendalian internal efektif membantu menjaga kualitas laporan
Sistem Informasi	Integrasi sistem informasi mulai membantu akurasi dan kecepatan laporan

Sumber: diolah peneliti, 2025

2. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan penerapan SAP dan peningkatan kualitas informasi keuangan daerah di Kota Pariaman

Kompetensi sumber daya manusia dianggap sebagai faktor utama yang tidak dapat diabaikan. Proses pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan keuangan akan dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu oleh SDM yang memiliki pengetahuan memadai mengenai SAP, akuntansi pemerintahan, dan sistem informasi. Fitri (2017) serta JAEBE (2020) sepakat bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM merupakan kunci untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sistem informasi juga menjadi pendukung penting dalam penerapan SAP. Putra, Yulastri, dan Giatman (2022) menekankan bahwa penerapan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan percepatan pengolahan data dan meminimalkan human error. Kota Pariaman telah mulai menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah yang membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Penggunaan teknologi ini sangat relevan dalam era digitalisasi pemerintahan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, sistem pengendalian internal yang efektif turut berperan dalam menjaga keandalan dan validitas data keuangan. Udiyanti (2021) menjelaskan bahwa sistem pengendalian yang baik membantu mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan dalam proses akuntansi. Kota Pariaman sudah menerapkan mekanisme pengendalian internal yang mulai menunjukkan hasil positif, seperti yang terlihat dari laporan audit yang relatif bersih dari temuan signifikan.

Dukungan manajemen, terutama pimpinan perangkat daerah, juga sangat berperan dalam mendorong penerapan SAP secara optimal. Dukungan ini termasuk alokasi sumber daya, kebijakan yang mendukung, serta pemberian motivasi kepada staf yang terlibat dalam proses akuntansi. Ningsih (2014) menegaskan bahwa dukungan atasan yang jelas dan konsisten mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan secara langsung.

3. Hambatan dalam Penerapan SAP dan Implikasinya terhadap Kualitas Informasi Keuangan

Meski berbagai kemajuan telah dicapai, hambatan dalam penerapan SAP tetap menjadi isu penting yang berdampak pada kualitas informasi keuangan daerah. Hambatan utama yang ditemukan antara lain resistensi terhadap perubahan, keterbatasan pelatihan bagi SDM, serta kendala teknis pada sistem informasi yang digunakan.

Resistensi terhadap perubahan merupakan fenomena yang umum dalam organisasi, terutama ketika implementasi SAP mengharuskan perubahan signifikan dalam cara kerja dan proses bisnis. Jurnal Dharmawangsa (2021) dan Ningsih (2014) menyoroti bahwa resistensi ini sering muncul akibat ketidakpahaman, ketidaknyamanan dengan teknologi baru, dan kurangnya komunikasi yang efektif dalam organisasi. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan, kesalahan, atau bahkan manipulasi data yang menurunkan kualitas laporan keuangan.

Keterbatasan pelatihan dan pendidikan bagi SDM juga menjadi penghambat penting. Beberapa staf akuntansi di perangkat daerah masih belum sepenuhnya menguasai SAP terbaru, sehingga menimbulkan kesalahan teknis dalam pencatatan dan pelaporan. Hal ini didukung oleh temuan Fitri (2017) yang menunjukkan hubungan erat antara kualitas pelatihan dan keberhasilan penerapan SAP.

Selain itu, kendala teknis pada sistem informasi, seperti kurangnya integrasi, infrastruktur yang belum memadai, dan masalah dalam pengelolaan data elektronik, turut memperlambat proses pelaporan. Putra et al. (2022) menggarisbawahi bahwa meski teknologi sudah mulai digunakan, optimalisasi sistem informasi masih perlu dilakukan agar dapat mendukung sepenuhnya proses akuntansi pemerintahan.

Hambatan-hambatan ini, jika tidak segera diatasi, akan berdampak negatif pada kualitas informasi keuangan. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menurunkan kepercayaan pengguna laporan, baik internal maupun eksternal. Hal ini berpotensi mengganggu proses pengambilan keputusan dan mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah.

4. Dampak Penerapan SAP terhadap Kualitas Informasi Keuangan

Penerapan SAP yang efektif terbukti memberikan dampak signifikan pada kualitas informasi keuangan daerah. LKPD Kota Pariaman yang disusun sesuai SAP mampu memberikan informasi yang lebih relevan, dapat dipercaya, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. Ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) dan Fauziah (2018) yang menegaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk menghasilkan laporan yang memenuhi kebutuhan pengambil keputusan dan pengguna laporan lainnya.

Dampak positif lain adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas memungkinkan pemantauan penggunaan anggaran dan sumber daya secara efektif, sehingga mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Abdul Halim dan Kusufi (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan adalah elemen kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kualitas informasi yang baik juga mendukung keterbandingan antar periode dan antar daerah, yang mempermudah evaluasi kinerja dan perencanaan ke depan. Yani dan Kusumaningarti (2024) menekankan bahwa standar yang seragam menjadi dasar bagi analisis yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat.

5. Implikasi Praktis dan Teoretis

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah khususnya Kota Pariaman dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan yang berkesinambungan harus menjadi prioritas utama. Selain itu, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan user-friendly sangat diperlukan untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporan.

Manajemen perlu memberikan dukungan penuh terhadap penerapan SAP dengan menyediakan anggaran, fasilitas, serta kebijakan yang mendukung perubahan. Upaya mengatasi resistensi terhadap perubahan juga perlu dilakukan melalui sosialisasi yang intensif dan pelibatan seluruh stakeholder dalam proses transformasi akuntansi pemerintahan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa penerapan SAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan daerah, yang selanjutnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Manuari (2025) dan memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan implementasi SAP.

Tabel 2. Rekomendasi Penguatan Implementasi SAP

Bidang	Rekomendasi Utama
Sumber Daya Manusia	Menyediakan pelatihan berkala dan sertifikasi di bidang akuntansi pemerintahan
Teknologi Informasi	Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan user-friendly
Dukungan Manajemen	Meningkatkan komitmen dan kebijakan pimpinan terhadap implementasi SAP
Pengendalian Internal	Memperkuat sistem audit internal dan pengawasan keuangan rutin

Sumber: diolah peneliti, 2025

6. Peran Kompetensi SDM dalam Penerapan SAP dan Kualitas Informasi Keuangan

Salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan SAP di lingkungan pemerintahan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia yang mengelola proses akuntansi. Kompetensi ini mencakup pengetahuan teknis tentang standar akuntansi pemerintahan, kemampuan pengoperasian sistem informasi keuangan, serta pemahaman terhadap prosedur pengendalian internal.

Fitri (2017) menekankan bahwa kompetensi SDM berkaitan erat dengan keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual di SKPD Kota Pariaman. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa SDM yang terlatih dan memiliki pemahaman mendalam terhadap SAP mampu mengolah data keuangan dengan lebih tepat dan akurat. Sebaliknya, kurangnya kompetensi menjadi penyebab kesalahan pencatatan dan pelaporan yang berujung pada kualitas laporan yang rendah.

Fenomena ini juga diperkuat oleh Udiyanti (2021) yang mengemukakan bahwa kompetensi staf akuntansi, selain sistem pengendalian internal, menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan perangkat daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang terstruktur.

Mardiasmo (2018) juga menegaskan pentingnya SDM yang kompeten dalam konteks akuntansi sektor publik, karena mereka bukan hanya bertugas mencatat transaksi, tetapi juga melakukan analisis dan interpretasi data untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi harus menyertakan aspek teknis maupun pemahaman konteks pemerintahan.

7. Sistem Informasi sebagai Pendukung Utama Penerapan SAP

Kemajuan teknologi informasi menjadi pendukung penting dalam penerapan SAP, terutama dalam penyajian laporan keuangan yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Putra, Yulastri, dan Giatman (2022) meneliti pengaruh penerapan sistem informasi pemerintahan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kota Pariaman dan menemukan hubungan positif yang signifikan. Sistem informasi yang terintegrasi mampu meminimalisir kesalahan input data, mempercepat proses pengolahan, dan mempermudah monitoring serta evaluasi.

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi juga memudahkan proses audit, karena data tersimpan secara digital dan mudah diakses. Ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam standar akuntansi pemerintahan. ResearchGate (2025) bahkan menggarisbawahi bahwa sistem informasi yang mutakhir merupakan pondasi penting dalam mendukung akuntabilitas fiskal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

8. Resistensi terhadap Perubahan sebagai Tantangan dalam Implementasi SAP

Proses perubahan yang melibatkan penerapan SAP bukan tanpa hambatan, salah satunya adalah resistensi internal yang muncul dari individu maupun kelompok dalam organisasi pemerintahan. Jurnal Dharmawansa (2021) mengidentifikasi bahwa resistensi ini sering muncul karena ketidakpastian, kekhawatiran kehilangan pekerjaan, atau ketidakmampuan memahami teknologi dan prosedur baru.

Resistensi terhadap perubahan berpotensi memperlambat proses implementasi SAP, bahkan menimbulkan kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan. Hal ini membutuhkan pendekatan manajemen perubahan yang efektif, termasuk komunikasi yang jelas, pelatihan yang memadai, serta pemberian motivasi dan insentif bagi pelaksana.

Penelitian oleh Ningsih (2014) juga menyoroti pentingnya dukungan pimpinan dalam mengurangi resistensi ini. Pimpinan yang aktif memberikan arahan, memfasilitasi pelatihan, dan mendorong partisipasi aktif staf dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk perubahan.

9. Kualitas Informasi Keuangan Daerah sebagai Output Utama Penerapan SAP

Kualitas informasi keuangan yang dihasilkan melalui penerapan SAP dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. LKPD Kota Pariaman yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan peningkatan kualitas yang mencerminkan perbaikan dalam aspek-aspek tersebut.

JAEBE (2020) dan Unisbar (2024) secara khusus mengaitkan penerapan SAP dan efektivitas sistem pengendalian internal dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, baik dalam hal akurasi data maupun waktu penyajian laporan. Informasi yang berkualitas memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi keuangan secara tepat dan mengambil keputusan strategis yang tepat.

Lebih lanjut, Unes Padang (2020) dalam kajiannya membandingkan kinerja keuangan Kota Pariaman dengan Kota Padang dan menemukan bahwa penerapan SAP yang lebih baik di Pariaman memberikan keunggulan dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan yang transparan.

10. Sinergi antara Penerapan SAP dan Sistem Pengendalian Internal

Penelitian Udiyanti (2021) dan Unisbar (2024) menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan SAP, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengendalian internal. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan semua proses akuntansi berjalan sesuai aturan dan standar.

Kombinasi penerapan SAP yang baik dan sistem pengendalian internal yang efektif menciptakan sinergi yang memperkuat keandalan laporan keuangan. Hal ini terlihat dari berkurangnya

temuan audit dan meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi. Kota Pariaman, melalui upaya perbaikan sistem pengendalian internal, telah mulai merasakan manfaat ini sebagaimana tercermin dalam laporan audit terakhir.

11. Implikasi bagi Pengembangan Kebijakan dan Praktik Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa rekomendasi penting untuk pengembangan kebijakan dan praktik di lingkungan pemerintahan daerah. Pertama, peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM harus menjadi program prioritas, dengan fokus pada pemahaman SAP dan pengoperasian sistem informasi akuntansi. Kedua, investasi dalam teknologi informasi harus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk memastikan sistem yang digunakan dapat memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang dinamis dan kompleks. Ketiga, sistem pengendalian internal harus terus diperkuat melalui prosedur audit internal yang rutin dan mekanisme pengawasan yang transparan. Keempat, manajemen perubahan perlu dikelola dengan baik untuk mengatasi resistensi dan memastikan seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam penerapan SAP. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan komunikasi yang terbuka, pelibatan stakeholder, serta pemberian penghargaan atas pencapaian yang diraih.

12. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian

Selanjutnya Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan penerapan SAP dengan kualitas informasi keuangan daerah di Kota Pariaman, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penggunaan data sekunder menjadi salah satu batasan, karena data yang tersedia terbatas pada dokumen dan laporan yang telah dipublikasikan tanpa adanya pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei langsung. Selain itu, penelitian ini lebih banyak fokus pada aspek teknis pelaporan keuangan dan belum mendalami faktor-faktor sosial budaya atau politik yang mungkin juga mempengaruhi penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan.

13. Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Salah satu aspek yang tak kalah penting dalam mendukung penerapan SAP adalah program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ningsih (2014) menegaskan bahwa kejelasan tujuan pelatihan serta dukungan dari atasan sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas informasi keuangan. Dengan adanya pelatihan yang tepat, SDM tidak hanya mampu memahami standar akuntansi dengan lebih baik, tetapi juga dapat mengimplementasikan sistem informasi secara efektif dan efisien.

Pelatihan yang berkelanjutan juga menjadi strategi penting untuk mengimbangi perkembangan regulasi dan teknologi yang cepat. Hal ini penting agar sistem akuntansi yang diterapkan tidak menjadi usang dan dapat memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Pemerintah Kota Pariaman, sebagaimana yang tercermin dari berbagai laporan dan studi (Fitri, 2017; JAEBE, 2020), telah melakukan beberapa program pelatihan, namun masih perlu penguatan dalam hal intensitas dan cakupan materi agar benar-benar mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan secara menyeluruh.

14. Pengaruh Lingkungan Organisasi dan Budaya Kerja terhadap Implementasi SAP

Selain faktor teknis, lingkungan organisasi dan budaya kerja juga memiliki peranan penting dalam keberhasilan penerapan SAP. Lingkungan organisasi yang mendukung, dimana pimpinan memberikan arahan yang jelas dan memberikan penghargaan atas kinerja, akan mendorong pegawai untuk berkomitmen menjalankan standar akuntansi dengan baik.

Yani dan Kusumaningarti (2024) menggarisbawahi pentingnya budaya kerja yang transparan dan akuntabel sebagai pondasi penerapan akuntansi sektor publik yang efektif. Di Kota Pariaman, upaya membangun budaya ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengubah pola pikir lama yang cenderung enggan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan prosedur baru. Resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan nyata yang harus diatasi dengan strategi manajemen perubahan yang efektif. Budaya kerja yang baik akan mempengaruhi disiplin dalam pencatatan dan pelaporan, mengurangi peluang terjadinya manipulasi data, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

15. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar bagi pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan dengan lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan aplikasi akuntansi berbasis komputer, seperti yang diuraikan oleh Putra, Yulastri, dan Giatman (2022), mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelaporan.

Teknologi informasi tidak hanya mempercepat penyusunan laporan, tetapi juga memudahkan integrasi data dari berbagai sumber sehingga menghasilkan laporan yang komprehensif dan mudah dianalisis. Dengan sistem yang terintegrasi, kesalahan manual dapat diminimalisir dan proses audit menjadi lebih cepat serta akurat. Namun, efektivitas penggunaan teknologi ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten. Kota Pariaman telah melakukan investasi pada infrastruktur TI, namun pelatihan pengguna dan pengembangan sistem secara terus-menerus masih menjadi tantangan yang harus dihadapi agar manfaat teknologi dapat maksimal.

16. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akurasi dan Keandalan Laporan Keuangan

Sistem pengendalian internal merupakan elemen kritis yang memastikan setiap transaksi dan pencatatan sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku. Udiyanti (2021) dan Unisbar (2024) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif akan mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga meningkatkan kualitas informasi keuangan daerah.

Dalam konteks Kota Pariaman, penguatan sistem pengendalian internal perlu dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi secara rutin. Prosedur audit internal harus menjadi kegiatan yang konsisten dan diikuti oleh seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas data keuangan. Selain itu, pengembangan mekanisme pelaporan yang transparan dan mekanisme tindak lanjut atas temuan audit harus diprioritaskan agar setiap masalah yang terdeteksi dapat segera diperbaiki.

17. Analisis Keterkaitan antara Penerapan SAP dan Kualitas Informasi Keuangan

Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan yang ada, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan SAP dengan kualitas informasi keuangan daerah. SAP yang diterapkan dengan baik menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga mampu memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah.

Menurut JAEBE (2020) dan Jurnal Dharmawangsa (2021), penerapan SAP yang konsisten dengan standar yang berlaku menjadi dasar utama peningkatan kualitas laporan, yang mencakup aspek relevansi, keandalan, dan keterpahaman. Laporan yang berkualitas ini sangat penting bagi pengambilan keputusan yang efektif dan pertanggungjawaban kepada publik. Lebih jauh, keberhasilan penerapan SAP juga bergantung pada sinergi antara aspek teknis seperti kompetensi SDM dan teknologi informasi, dengan aspek organisasi seperti pengendalian internal dan budaya kerja. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan daerah, dengan fokus pada studi kasus di Kota Pariaman menggunakan pendekatan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang tersedia, diperoleh temuan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan semakin lengkap dan sistematisnya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, baik dari sisi relevansi, keandalan, keterbandingan, maupun keterpahaman. Penerapan SAP yang konsisten mendorong penyajian laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga memudahkan para pemangku kepentingan, seperti auditor, legislatif, maupun masyarakat umum dalam memahami kondisi keuangan pemerintah daerah secara objektif dan menyeluruh.

Temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian dan membuktikan bahwa penerapan SAP memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan kualitas informasi dalam laporan keuangan daerah. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa SAP bukan hanya kerangka kerja formal yang diwajibkan oleh regulasi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam upaya menciptakan tata kelola

keuangan publik yang lebih baik. Implikasi dari hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu terus mendorong implementasi SAP secara menyeluruh dan mendalam, tidak hanya dalam aspek teknis penyusunan laporan, tetapi juga pada aspek pendukung seperti penguatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi akuntansi, serta optimalisasi fungsi pengawasan internal.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan utama adalah bahwa data yang digunakan sepenuhnya berasal dari sumber sekunder, yaitu laporan keuangan yang telah diterbitkan secara resmi, tanpa melibatkan data primer seperti wawancara atau kuesioner kepada para pelaksana teknis. Hal ini menyebabkan penelitian tidak dapat menggali lebih dalam faktor-faktor non-teknis seperti persepsi aparatur terhadap SAP, tantangan implementasi di lapangan, atau dinamika organisasi dalam menghadapi perubahan sistem akuntansi. Selain itu, ruang lingkup penelitian yang hanya terbatas pada satu daerah, yaitu Kota Pariaman, juga membatasi generalisasi hasil ke konteks daerah lain yang mungkin memiliki kondisi organisasi, kapasitas keuangan, dan budaya birokrasi yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar studi lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari segi wilayah maupun metode. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan data primer dan sekunder, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai hubungan antara SAP dan kualitas informasi keuangan daerah. Selain itu, penelitian komparatif antar daerah juga penting dilakukan guna mengetahui praktik terbaik (*best practice*) serta variasi dalam implementasi SAP di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, kontribusi ilmiah dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga memberikan dasar pertimbangan yang kuat bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi penguatan sistem akuntansi pemerintahan di tingkat daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Aryanto Nur, S.E., M.M., Ak., CPA., M.Ak. selaku dosen pengampu mata kuliah Akutansi Manajaemen Menengah 1 sekaligus dosen pembimbing kami dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan di Program Studi Akuntansi, yang telah memberikan banyak masukan, diskusi ilmiah, serta motivasi selama proses penyusunan jurnal ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim teknis pengelola jurnal ilmiah yang telah membantu dalam proses pengumpulan dan penyuntingan naskah ini agar dapat memenuhi standar publikasi ilmiah yang ditetapkan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan jurnal ini tidak akan berhasil tanpa dukungan, doa, dan semangat dari keluarga tercinta yang senantiasa memberikan motivasi moral dan spiritual dalam setiap proses yang dijalani. Semoga segala bentuk bantuan dan kontribusi dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dan membawa keberkahan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan jurnal ini dan terbuka terhadap segala bentuk saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Halim, A., & Kusufi, S. 2014. *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Fitri, A. 2017. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan dan sistem informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Studi empiris pada SKPD Pemerintahan Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 15–28. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2652/0> (Diakses pada 15 September 2025)
- [3] Fauziah, I. 2018. *Buku standar akuntansi pemerintahan* (1st ed.). Jakarta: Ilmu Media.
- [4] JAEBE. 2020. Penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan (Studi pada perangkat daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Bisnis*, 8(1), 45–55. <https://journal.unm.ac.id/index.php/JAEBE/article/download/2262/1959/8679> (Diakses pada 15 September 2025)
- [5] Jurnal Dharmawangsa. 2021. Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi empiris pada SKPD Kota Pariaman). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 5(3), 60–72. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/4284> (Diakses pada 15 September 2025)
- [6] Ningsih, S. 2014. Pengaruh kejelasan tujuan, dukungan atasan, pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Studi empiris pada SKPD Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 88–97. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1237> (Diakses pada 15 September 2025)
- [7] Manuari, & Ratih, I. A. 2025. *Buku akuntansi sektor publik*. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press.
- [8] Mardiasmo. 2018. *Akuntansi sektor publik: edisi terbaru* (Cet. I). Yogyakarta: Andi.
- [9] Pemerintah Kota Pariaman. 2023. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Audited) [https://www.pariamankota.go.id/admin/files/transparansi/1694706995Laporan%20Keuangan%20Pemerintah%20Daerah%20Kota%20Pariaman%20\(LKPD\)%20Tahun%202022.pdf](https://www.pariamankota.go.id/admin/files/transparansi/1694706995Laporan%20Keuangan%20Pemerintah%20Daerah%20Kota%20Pariaman%20(LKPD)%20Tahun%202022.pdf) (Diakses pada 15 September 2025)

- [10] Putra, F. S., Yulastri, A., & Giatman. 2022. Pengaruh penerapan sistem informasi pemerintahan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kota Pariaman. *Indonesian Journal of Computer Science*, 3(2), 112–121. <https://ijcs.net/ijcs/index.php/ijcs/article/download/3466/289/2605> (Diakses pada 15 September 2025)
- [11] ResearchGate. 2025. Pengaruh penerapan sistem informasi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kota Pariaman (WorkingPaper).https://www.researchgate.net/publication/375699325_Pengaruh_Penerapan_Sistem_Informasi_Pemerintah_Daerah_Terdapat_Kualitas_Laporan_Keuangan_Kota_Pariaman (Diakses pada 15 September 2025)
- [12] Udiyanti, N. L. N. A. 2021. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada perangkat daerah (PD) Kota Pariaman. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis (JAKBS)*, 6(1), 33–44. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/771/670> (Diakses pada 15 September 2025)
- [13] Unes Padang. 2020. Analisis perbandingan kinerja keuangan antara Pemerintah Kota Padang dan Kota Pariaman. *Paduan/Jurnal Lokal*, 4(1), 55–64. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/520>(Diakses pada 15 September 2025)
- [14] Unisbar. 2024. Pengaruh standar akuntansi pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal dan faktor lain terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 75–86 <https://ojs.unisbar.ac.id/index.php/jpema/article/download/372/240/1875> (Diakses pada 15 September 2025)
- [15] Yani, A. & Kusumaningarti, M. 2024. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo